



# **RENCANA KERJA**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
2017**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan tingkat organisasi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Tahun 2016 - 2021 yang telah mengalami penyesuaian terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan rencana strategis di tingkat OPD yang menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2018.

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2018 berdasarkan hasil Forum OPD yang melibatkan *stakeholders* pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini

mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 21 Maret 2017  
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK



**Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580131 198811 2 001



**PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2018**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
2017**



**PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 dengan Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik ini yang dimaksud dengan:

1. OPD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
2. Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;

3. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah merupakan
4. Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk periode Tahun 2017;
5. Renstra OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
6. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. RKA OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
9. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
10. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah;
12. Forum OPD adalah forum yang dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah bersama pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
13. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

## **Pasal 2**

1. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021.
2. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021.

3. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 didahului dengan Penyelenggaraan Forum OPD.
4. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi:
  - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten, selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2018;
  - b. Pedoman bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2018.

### **Pasal 3**

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	: PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
BAB V	: PENUTUP

### **Pasal 4**

Uraian Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 24 Maret 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK



Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19580131 198811 2 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah dan terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, menengah serta perencanaan tahunan. Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa dokumen perencanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
15. Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2018.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja ) ini adalah :

1. Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertuang dalam Renstra Tahun 2016-2021;
2. Sebagai acuan bagi seluruh komponen Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan kinerja tahun 2018;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018;
4. Menciptakan kepastian kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.
- 3.2 Program dan Kegiatan.

## **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

- 4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 4.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 4.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 4.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 4.5 Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran.
- 4.6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 4.7 Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah.
- 4.8 Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB.
- 4.9 Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah.
- 4.10 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Dan Barang Daerah.

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dialokasikan dana Belanja Langsung sebesar Rp 25.934.304.400,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat ribu empat ratus rupiah) untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan. Setelah Perubahan APBD tahun 2016, anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi sebesar Rp. 24.514.147.850,00 (dua puluh empat milyar lima ratus empat belas juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan. Dari Anggaran sebesar Rp. 24.514.147.850,00 (dua puluh empat milyar lima ratus empat belas juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 20.364.811.652,00 (dua puluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 4.149.336.198,00 (empat milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Tidak terserapnya anggaran tersebut sebagian besar merupakan efisiensi penggunaan dana kegiatan, tetapi dalam Kegiatan Penyelenggaraan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terdapat pemeliharaan yang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan belum diperlukannya pemeliharaan Aplikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Aplikasi Pembantu Bendahara dan Akuntansi. Dilihat dari kinerja

anggarannya tercapai sebesar 85,50% (delapan puluh lima koma lima puluh persen) dengan kategori prestasi *Baik*.

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan Tahun 2017, anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp. 23.021.831.203,00 (dua puluh tiga milyar dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah) yang dialokasikan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dengan 48 (empat puluh delapan) kegiatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 di bidang pendapatan dapat dikategorikan memuaskan. Hal tersebut dapat terlihat dari rasio capaian penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan pendapatan lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah tercapai sebesar 94,68%. PAD dari pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 465.539.000.000 (empat ratus enam puluh lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) terealisasi sebesar Rp 412.112.744.756,71 (empat ratus dua belas milyar seratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam koma tujuh puluh satu rupiah), atau terealisasi 88,52%. Sedangkan PAD dari pendapatan lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 209.082.431.829,28 (dua ratus sembilan milyar delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp 210.866.730.289,71 (dua ratus sepuluh milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh satu rupiah) atau realisasinya mencapai 100,85%.

Sedangkan tercapainya kinerja pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Daerah tidak terlepas dari tersedianya anggaran belanja untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Capaian Indikator kinerja merupakan

tingkat capaian target dari Indikator yang dicapai pada tahun 2016 diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja antara realisasi dengan target yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Pada Indikator tersusunnya APBD dan PAPBD tepat waktu realisasi capaian kerjanya sebesar 100% sedangkan indikator tersusunnya laporan keuangan dan kinerja tepat waktu realisasinya juga tercapai 100%. sedangkan indikator tersusunnya laporan keuangan dan kinerja tepat waktu realisasinya juga tercapai 100%.

Pada tahun 2016, belanja tidak langsung DPPKAD berupa belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 50.939.865.00,00 sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 24.514.147.850,00 yang terdiri atas belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 4.019.184.000,00 , belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 19.338.573.850,00 serta belanja modal dianggarkan Rp. 1.156.390.000,00. Dari Anggaran belanja tersebut, belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 38.361.068.152,00 atau mencapai 75,31%. Sedangkan dari belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 20.364.811.652,00 atau mencapai 85,50% yang terdiri atas realisasi belanja langsung pegawai Rp 3.136.317.000,00 atau sebesar 78,03%, belanja barang dan jasa sebesar Rp 16.121.436.944,00 atau sebesar 83,36% serta belanja modal terealisasi sebesar Rp 1.107.057.708,00 atau sebesar 95,73%.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi kinerja dinas.

Adapun permasalahan dan hambatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya pelayanan prima;
2. Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat;
3. Belum terselenggarannya pemungutan pendapatan secara andal;



4. Kurangnya pemahaman petugas operasional mengenai tugas dan fungsinya;
5. Monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja pemungutan pajak serta kinerja kegiatan SKPD yang belum dilakukan optimal;
6. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang belum optimal;
7. Pengelolaan aset daerah yang belum tertib;
8. Banyak pengaduan dari Wajib Pajak, khususnya jenis Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Tingkat kesadaran wajib pajak daerah yang belum merata.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang telah teridentifikasi lebih awal dan telah dilakukannya langkah-langkah antisipasi, berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terwujudnya: transparansi dalam pemungutan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; peningkatan pendapatan asli daerah, dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu; laporan keuangan dan kinerja tepat waktu; dan terwujudnya pelayanan prima.

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam rangka penyerapan aspirasi dari masyarakat, maka dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan Forum SKPD yang diikuti oleh beberapa elemen, diantaranya dari unsur SKPD, yaitu: kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi; dari unsur akademisi, LSM, Instansi vertikal dan perwakilan staf. Dari pelaksanaan forum tersebut tidak ada usulan program dan kegiatan baru, hanya berupa saran dan masukan dari peserta forum SKPD agar dalam melaksanakan program dan kegiatannya Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik lebih melibatkan masyarakat ataupun instansi terkait lainnya.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dituntut untuk mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016-2021:

***“ Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera dan Berkehidupan yang Berkualitas ”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai OPD menyelenggarakan urusan pendukung (Keuangan) yang diarahkan untuk mencapai tujuan ke-1 pada misi ke-3 RPJMD Kabupaten Gresik, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dengan indikator kerja daerah berupa angka pertumbuhan ekonomi. Terkait tujuan tersebut, sasaran yang ditetapkan adalah meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual.

Tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan visi dari Pemerintah kabupaten Gresik diimplementasikan melalui Misi pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1). Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik;
- 2). Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan OPD;

- 3). Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu;
- 4). Meningkatkan pendapatan pajak daerah
- 5). Melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan transparan, akuntabel dan tertib.

### **3.2 Program dan Kegiatan.**

Program dan Kegiatan yang dirancang oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan:
  1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
  5. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor; dan
  6. Penyediaan Jasa Operasional Kantor.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan:
  1. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga;
  2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga;
  3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional; dan
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
  1. Peningkatan Kualitas SDM SKPD.

- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  2. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  3. Koordinasi Penyusunan Sisdur Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- e. Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran:
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
  2. Penyusunan Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan APBD;
  3. Koordinasi Penyusunan Belanja PPKD;
  4. Sosialisasi Kebijakan Penganggaran; dan
  5. Penyelenggaraan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- f. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah:
1. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Penatausahaan Keuangan Daerah;
  3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah; dan
  4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- g. Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah:
1. Pendataan Pajak;
  2. Pemeriksaan Pajak Daerah;
  3. Pengelolaan Benda Berharga;
  4. Sosialisasi Pajak Daerah; dan
  5. Analisis Potensi Pajak Daerah.

**h. Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB:**

1. Penilaian Individu;
2. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Pemeliharaan Basis Data PBB; dan
4. Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan.

**i. Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah:**

1. Penagihan Pajak;
2. Fasilitasi Keberatan Pajak Daerah;
3. Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
4. Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Bagi Hasil;
5. Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Cerme;
6. Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Sidayu;
7. Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Driyorejo;
8. Pengelolaan pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Bawean;
9. Pemutakhiran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Bulan Panutan Pajak PBB; dan
11. Peningkatan Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah.

**j. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Dan Barang Daerah:**

1. Penatusahaan Aset;
2. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
3. Penghapusan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah;
4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
5. Inventarisasi Aset pemerintah.

Untuk menunjang terlaksana dan tercapainya rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dana yang memadai. Anggaran yang dibutuhkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Rencana Kerja tahun 2018

untuk belanja langsung mencapai Rp 25.159.803.000,00 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah). Sumber pembiayaan diharapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2018.

**BAB IV**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

**4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

**A. Latar Belakang (Justifikasi)**

Salah satu faktor penting dalam proses pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah adalah terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.

**B. Tujuan Program**

Tujuan dari program tersebut adalah:

- Mengoptimalkan daya dukung pelayanan administrasi perkantoran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**C. Sasaran Program**

Sasaran dari program tersebut adalah:

- Internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Peningkatan fungsi administrasi perkantoran dalam rangka mendukung kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan realisasi kinerja, di internal BPPKAD.

**D. Kegiatan Indikatif**

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut:

1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Penyediaan Makanan dan Minuman;
4. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi;
5. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor; dan
6. Penyediaan Jasa Operasional Kantor;



## **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak;
2. Terpenuhinya Kebutuhan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Terpenuhinya Kebutuhan Makanan Dan Snack Pegawai;
4. Terselenggaranya Koordinasi Dan Konsultasi;
5. Terselenggaranya Administrasi kantor; dan
6. Terbayarnya Jasa Operasional Kantor;

## **4.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

### **A. Latar Belakang (Justifikasi)**

Upaya pengelolaan keuangan dan pemungutan Pendapatan Daerah, khususnya pemungutan Pajak Daerah serta pendukung peningkatan penerimaan bagi hasil pajak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi akan dapat dilaksanakan secara optimal, bila sarana dan prasarana pemungutan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.

### **B. Tujuan Program**

Tujuan dari program tersebut adalah :

- Mengoptimalkan daya dukung sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan pengelolaan keuangan daerah.

### **C. Sasaran Program**

Sasaran dari program tersebut adalah:

- Internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

- Terlaksananya Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Gedung/Rumah Tangga dan Kendaraan Dinas/Operasional PPKAD .

#### **D. Kegiatan Indikatif**

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut:

1. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional; dan
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga.

#### **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan dari 4 kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut :

- Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
- Terpeliharanya Gedung;
- Terpeliharanya Kendaraan Dinas; dan
- Diperbaikinya Peralatan Kerja.

### **4.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

#### **A. Latar Belakang (Justifikasi)**

Meningkatkan sumber daya aparatur adalah salah satu cara untuk meningkatkan *good governance* dari sisi aparatur yang bekerja didalamnya.

#### **B. Tujuan Program**

Tujuan program adalah meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur yang ada.

#### **C. Sasaran Program**

Sasaran dari program adalah aparatur yang mampu mendukung *good governance*.

#### **D. Kegiatan Indikatif**

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM SKPD.

#### **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

- Terselenggaranya pelatihan/kursus dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

### **4.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

#### **A. Latar Belakang (Justifikasi)**

Dalam rangka merealisasikan *good governance* pada lingkup Dinas, maka diperlukan adanya perencanaan seluruh kegiatan secara terukur, diikuti dengan evaluasi, monitoring serta pelaporan kinerja secara berkala.

#### **B. Tujuan Program**

Tujuan program adalah merealisasikan peningkatan kualitas dokumen perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pelaporan kinerja secara terstruktur dan terukur.

#### **C. Sasaran Program**

Sasaran dari program adalah internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah untuk mewujudkan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara obyektif, terukur dan akuntabel serta mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah.

#### **D. Kegiatan Indikatif**

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD; dan
3. Koordinasi Penyusunan Sisdur Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

#### **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tercetaknya Laporan Keuangan TA. 2017 dan LAKIP TA. 2017;
2. Tercetaknya Buku Rencana Kerja TA.2018, DPPA TA. 2018 dan DPA TA. 2018; dan
3. Tercetaknya Perbup dan SOP.

### **4.5. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah**

#### **A. Latar Belakang (Justifikasi)**

Dalam rangka mewujudkan Penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual dibutuhkan tersediannya informasi perencanaan dan penganggaran yang akuntabel dan tepat waktu. Oleh karena itu diperlukan adanya program pengelolaan penganggaran untuk dapat menyusun APBD dan PAPBD yang berkualitas sebagai dokumen yang memberikan informasi terkait penganggaran terhadap perencanaan yang telah disusun melalui prosedur yang sudah ditetapkan.

## **B. Tujuan Program**

Tujuan dari program tersebut adalah:

1. Menyediakan dokumen penganggaran berupa APBD dan PAPBD untuk dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif oleh seluruh OPD.
2. Menyelaraskan pendapatan daerah yang diterima dengan belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
3. Mengkoordinasikan berbagai pihak terkait untuk adapat mewujudkan dokumen yang disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **C. Sasaran Program**

Sasaran dari program tersebut adalah :

1. Pemerintah Daerah dan seluruh stokeholder dalam proses penganggaran APBD dan PAPBD;
2. Seluruh komponen pelaksanaan APBD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah;

## **D. Kegiatan Indikatif**

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
2. Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan APBD;
3. Koordinasi Penyusunan Belanja PPKD;
4. Sosialisasi Kebijakan Penganggaran; dan
5. Penyelenggaraan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

## **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Perda APBD dan PAPBD serta Perbup tentang Penjabaran APBD dan PAPBD;
2. Tersusunnya Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD;

3. Tersusunnya Buku RKA, DPA, RDPPA dan DPPA PPKD serta Data Kebutuhan Anggaran Belanja Pegawai;
4. Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penganggaran; dan
5. Terselenggaranya Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Terpeliharannya Aplikasi yang dibutuhkan.

#### **4.6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatusahaan Keuangan Daerah**

##### **A. Latar Belakang (Justifikasi)**

Dalam rangka mewujudkan penatusahaan aset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual dibutuhkan penatusahaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual dibutuhkan penatusahaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Oleh karena itu diperlukan adanya program pembinaan dan fasilitasi penatusahaan keuangan daerah untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD melalui laporan keuangan OPD ataupun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

##### **B. Tujuan Program**

Tujuan dari program tersebut adalah:

1. Melakukan Pembinaan Penatusahaan dan Pelaporan kepada Pengelola Keuangan di OPD maupun OPKD;
2. Memberikan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di seluruh OPD; dan
3. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

### **C. Sasaran Program**

Sasaran dari program tersebut adalah :

1. Pemerintah Daerah dan seluruh *stakeholder* dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
2. Pengelola Keuangan OPD dan OPKD.

### **D. Kegiatan Indikatif**

Sasaran dari program tersebut adalah :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penatausahaan Keuangan Daerah;
3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah; dan
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

### **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek;
2. Tercukupinya administrasi penatausahaan keuangan berupa SK, SPD, SP2D, Laporan Posisi Kas, dan Laporan Pertanggungjawaban lainnya seluruh OPD;
3. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I, Prognosis Tahun 2018 dan LRA Perbulan; dan
4. Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## **4.7 Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah**

### **A. Latar Belakang (Justifikasi)**

Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah. Pendapatan pajak daerah yang dimaksud pada program ini adalah pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari jenis pajak selain PBB dan BPHTB (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan). Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai program peningkatan pendapatan pajak daerah diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

### **B. Tujuan Program**

Tujuan program adalah meningkatkan penerimaan pajak daerah (selain PBB dan BPHTB) untuk memenuhi target pendapatan asli daerah.

### **C. Sasaran Program**

Sasaran dari program adalah

1. Wajib Pajak Daerah; dan
2. Potensi pendapatan pajak daerah.

### **D. Kegiatan Indikatif**

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut:

1. Pendataan Pajak;
2. Pemeriksaan Pajak Daerah;
3. Pengelolaan Benda Berharga;
4. Sosialisasi Pajak Daerah; dan
5. Analisis Potensi Pajak Daerah.



## **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah SPTPD yang terdata;
2. Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah;
3. Terselenggaranya legalisasi benda berharga;
4. Jumlah peserta dan jumlah cetakan publikasi; dan
5. Tersedianya laporan analisis potensi pajak daerah.

## **4.8 Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB**

### **A. Latar Belakang (Justifikasi)**

Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah. Pendapatan PBB dan BPHTB yang dimaksud pada program ini adalah pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari jenis pajak PBB dan BPHTB. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai program peningkatan pendapatan PBB dan BPHTB diantaranya melalui pendataan dan pendataan ulang terhadap objek-objek PBB, penyesuaian terhadap harga pasar objek, peningkatan pelayanan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB dan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **B. Tujuan Program**

Tujuan program adalah meningkatkan penerimaan pajak daerah dari PBB dan BPHTB untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

### **C. Sasaran Program**

Sasaran dari Program ini adalah:

1. Petugas/pemungut Pajak PBB dan BPHTB;

2. Objek dan Subjek/Wajib Pajak PBB dan BPHTB; dan
3. OPD dan instansi terkait penerimaan Pajak dan Wajib Pajak PBB dan BPHTB.

#### **D. Kegiatan Indikatif**

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut:

1. Penilaian Individu;
2. Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan;
3. Pemeliharaan Basis Data PBB; dan
4. Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Objek Pajak;
2. Terselenggaranya Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Jumlah Objek Pajak PBB yang diverifikasi; dan
4. Tercetaknya SPPT PBB tahun 2018.

### **4.9 Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah**

#### **A. Latar Belakang (Justifikasi)**

Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah. Pelayanan Pendapatan Daerah adalah pelayanan yang diberikan terhadap wajib pajak yang membutuhkan pelayanan pajak daerah, sedangkan yang dimaksud intensifikasi penerimaan pada program ini adalah upaya untuk lebih aktif melakukan penagihan kepada wajib pajak yang sudah ditetapkan maupun yang memiliki tunggakan. Jenis pajak yang dijadikan objek dalam

program ini adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, BPHTB (berdasarkan Perda Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah) serta PBB (berdasarkan Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai program peningkatan pendapatan pajak daerah diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

#### **B. Tujuan Program**

Tujuan Program adalah meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan pelayanan dan penagihan.

#### **C. Sasaran Program**

Sasaran dari program adalah

1. Wajib Pajak Daerah;
2. Petugas dan Instansi terkait pemungutan pajak daerah.

#### **D. Kegiatan Indikatif**

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut

1. Penagihan Pajak;
2. Fasilitasi Keberatan Pajak Daerah;
3. Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
4. Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Bagi Hasil;
5. Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah UPT BPPKAD Di Cerme;
6. Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Sidayu;
7. Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Driyorejo;

8. Pengelolaan Pemungutan pajak Daerah UPT BPPKAD Di Bawean
9. Pemutakhiran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
11. Peningkatan Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah.

#### **E. Indikator Keberhasilan**

1. Jumlah Penagihan Penunggak Pajak Daerah;
2. Jumlah Pemohon Keberatan yang ditindaklanjuti;
3. Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan;
4. Jumlah Pelaksanakan Koordinasi DBH Pusat dan Provinsi;
5. Terlaksananya Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Cerme;
6. Terlaksananya Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Sidayu;
7. Terlaksananya Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Driyorejo;
8. Terlaksananya Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Bawean;
9. Laporan Hasil Pemutakhiran Piutang PBB;
10. Jumlah Peserta Pelaksanaan Bulan Panutan PBB; dan
11. Terselenggaranya Pelayanan Pajak Daerah.

### **4.10 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset dan Barang Daerah**

#### **A. Latar belakang (Justifikasi)**

Dalam rangka mewujudkan penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual dibutuhkan pengelolaan aset yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual. Oleh karena itu

diperlukan adanya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset dan barang daerah untuk dapat terinventarisasinya seluruh aset milik pemerintah kabupaten secara akurat.

#### **B. Tujuan Program**

Tujuan dari program tersebut adalah:

1. Melakukan Pembinaan Penatausahaan dan Pelaporan Aset kepada Pengelola/Pengurus Barang di OPD maupun OPKD;
2. Memberikan Fasilitas Pengelolaan Aset Daerah di seluruh OPD; dan
3. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Akuntabel Transparan dan Tertib berbasis akuntansi akrual.

#### **C. Sasaran Program**

Sasaran dari program tersebut adalah:

1. Pengelola/Pengurus barang di OPD dan OPKD; dan
2. Instansi terkait pengelolaan aset dan barang daerah.

#### **D. Kegiatan Indikatif**

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif sebagai berikut:

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut

1. Penatausahaan Aset;
2. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
3. Penghapusan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah;
4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah; dan
5. Inventarisasi Aset Pemerintah.

#### **E. Indikator Keberhasilan**

1. Tersediannya Laporan Aset dalam LKPD;
2. Rasio aset yang dimanfaatkan;
3. Terlaksananya penandatanganan dan penghapusan aset;
4. Jumlah peserta yang mengikuti bimtek; dan
5. Terinventarisasinya fasum dan fasos.

#### 4.11. Pendanaan Indikatif

Untuk menunjang terlaksananya dan tercapainya rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dana yang memadai. Pagu Indikatif yang dibutuhkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Rencana Kerja pada tahun 2018 sebesar Rp 25.159.803.000,00 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah), tidak termasuk belanja langsung. Program dan Kegiatan beserta Pagu Indikatif Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2018</b>			
<b>4.03 KEUANGAN</b>			
<b>4.03.01 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			
<b>KODE</b>		<b>URAIAN</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>		<b>(RP)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1.998.675.000,00</b>
	02.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	700.900.000,00
	03.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	21.395.000,00
	05.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	163.050.000,00
	06.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	251.480.000,00
	07.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	376.958.000,00
	08.	Penyediaan Jasa Operasional Kantor	484.892.000,00
<b>02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>4.854.289.000,00</b>
	03.	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	1.810.797.000,00

KODE		URAIAN	PAGU INDIKATIF
PROGRAM	KEGIATAN		(RP)
1	2	3	4
	05.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga	766.182.000,00
	06.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas Operasional	904.910.000,00
	07.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	1.372.400.000,00
<b>05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>396.708.000,00</b>
	01.	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	396.708.000,00
<b>06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>291.831.900,00</b>
	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.775.000,00
	03.	Penyusunan Rencana kerja SKPD	85.244.000,00
	13.	Koordinasi Penyusunan Sisdur Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	125.812.900,00
<b>15.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah</b>		<b>4.133.950.000,00</b>
	01.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	2.893.638.000,00
	02.	Penyusunan Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan APBD	202.198.000,00
	03.	Koordinasi Penyusunan Belanja PPKD	112.791.000,00
	04.	Sosialisasi Kebijakan Penganggaran	245.823.000,00
	05.	Penyelenggaraan Dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	679.500.000,00
<b>16.</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatusahaan Keuangan Daerah</b>		<b>2.291.763.000,00</b>
	01.	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	869.520.000,00
	02.	Penatusahaan Keuangan Daerah	457.247.000,00

KODE		URAIAN	PAGU INDIKATIF
PROGRAM	KEGIATAN		(RP)
1	2	3	4
	03.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah	426.580.000,00
	04.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	538.416.000,00
<b>17.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah</b>		<b>2.571.161.000,00</b>
	01.	Pendataan Pajak	1.749.130.000,00
	02.	Pemeriksaan Pajak Daerah	163.891.000,00
	03.	Pengelolaan Benda Berharga	130.484.000,00
	04.	Sosialisasi Pajak	333.130.000,00
	06.	Analisis Potensi Pajak Daerah	194.526.000,00
<b>18.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB</b>		<b>2.068.000.100,00</b>
	01.	Penilaian Individu	105.500.000,00
	02.	Sosialisasi Bumi Dan Bangunan	850.000.100,00
	03.	Pemeliharaan Basis Data PBB	835.000.000,00
	05.	Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan	277.500.000,00
<b>19.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah</b>		<b>3.699.178.000,00</b>
	01.	Penagihan Pajak Daerah	1.877.965.000,00
	02.	Fasilitasi Keberatan Pajak Daerah	55.275.000,00
	03.	Koordinasi Dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	102.850.000,00
	04.	Koordinasi Dan Evaluasi Penerimaan Bagi Hasil	257.615.000,00
	05.	Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Cerme	51.000.000,00
	06.	Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Sidayu	68.000.000,00
	07.	Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Driyorejo	61.475.000,00
	08.	Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Bawean	33.550.000,00
	09.	Pemutakhiran Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan	465.186.000,00



KODE		URAIAN	PAGU INDIKATIF
PROGRAM	KEGIATAN		(RP)
1	2	3	4
	10.	Bulan Panutan Pajak Bumi Dan Bangunan	626.262.000,00
	11.	Peningkatan Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah	100.000.000,00
<b>20.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset dan Barang Daerah</b>		<b>2.854.247.000,00</b>
	01.	Penatausahaan Aset	1.496.636.000,00
	02.	Penggunaan Dan Pemanfaatan Aset Daerah	663.324.000,00
	03.	Penghapusan Dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah	395.000.000,00
	04.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	200.000.000,00
	05.	Inventarisasi Aset Pemerintah	98.400.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>25.159.803.000,00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Kabupaten Gresik tahun 2016-2021.
- 4.2. Bahwa Program dan Kegiatan Indikatif di dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 ini disusun dengan melibatkan seluruh pejabat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, meliputi pejabat eselon II, III dan IV dan stakeholders di Kabupaten Gresik.
- 4.3. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 ini digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada penyusunan Rencana APBD tahun 2018 yang akan datang.
- 4.4. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 diharapkan juga sebagai pedoman bagi peningkatan kinerja organisasi, sehingga mampu mewujudkan visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel 5.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

VISI RPJMD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021:

TERWUJUDNYA GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS

Tujuan 1 : Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah											
Indikator : Nilai Opini BPK											
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah											
No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun Dasar 2015	Target Per Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	1	Jumlah OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dibagi total OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan dikalikan 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase data aset yang akurat	1	100% dikurangi selisih jumlah aset yang disajikan dalam Laporan Keuangan sebelum dan setelah diaudit dibagi jumlah aset dalam Laporan Keuangan setelah diaudit dikalikan 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja keuangan daerah											
Indikator : Rasio kemandirian keuangan daerah											
Sasaran 1 : Meningkatnya pendapatan daerah											
No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun Dasar 2015	Target Per Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Persentase capaian realisasi pendapatan daerah	1	Realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikalikan 100%	%	93,36%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 5.2. Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif

VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021: TERWUJUDNYA GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS  
 SKPD : BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN : GRESIK  
 TAHUN : 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Mewujudkan pelayanan prima	Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100%	100%	4.235.692.000	100%	2.019.030.000	100%	2.173.585.000	100%	2.439.590.000	100%	2.681.770.000	100%	2.948.110.000					
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	552 unit	459 unit	425.000.000													Sekretariat	Kab. Gresik	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	1 Paket	1 Paket	404.012.000														Sekretariat	Kab. Gresik
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang dipenuhi	100%	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	752.760.000	100%	847.000.000	100%	931.700.000	100%	1.024.870.000			Sekretariat	Kab. Gresik	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik	12 bulan	12 bulan	275.000.000														Sekretariat	Kab. Gresik
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat dan perlengkapan kantor yang tersedia	58 unit	2 paket, 64 unit	978.000.000														Sekretariat	Kab. Gresik
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan	529 eksemplar/buku	772 eksemplar/buku	32.000.000	800 eksemplar/buku	32.000.000	800 eksemplar/buku	21.395.000	880 eksemplar/buku	35.280.000	950 eksemplar/buku	37.040.000	1000 eksemplar/buku	38.900.000			Sekretariat	Kab. Gresik	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI							
						2016		2017		2018		2019		2020		2021										
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan, snack, air galon, air kemasan yang disediakan	Makanan 1324 kotak; snack 3050 dus; Air galon 450 botol, air kemasan 600 karton,	Makanan 3540 kotak; snack 3800 dus; air galon 450 botol; air kemasan 600 karton.	176.000.000		Makanan 3403 kotak; snack 2953 dus; air galon 385 botol; air kemasan 374 karton.	163.050.000		Makanan 3403 kotak; snack 2953 dus; air galon 385 botol; air kemasan 374 karton.	163.050.000		Makanan 3403 kotak; snack 2953 dus; air galon 385 botol; air kemasan 374 karton.	197.290.000		Makanan 3403 kotak; snack 2953 dus; air galon 385 botol; air kemasan 374 karton.	217.020.000		Makanan 3403 kotak; snack 2953 dus; air galon 385 botol; air kemasan 374 karton.	238.720.000	Sekretariat	Kab. Gresik		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	300.000.000		12 bulan	300.000.000		12 bulan	330.000.000		12 bulan	363.000.000		12 bulan	399.300.000		12 bulan	439.230.000	Sekretariat	Kab. Gresik		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai; perangko; paket		600 lembar materai; 140 surat ; 15 paket	9.700.000																Sekretariat	Kab. Gresik		
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah petugas barang yang dibayar	6 Orang	20 Orang	103.080.000																	Sekretariat	Kab. Gresik	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayar	18 Orang	20 Orang	224.000.000																		Sekretariat	Kab. Gresik
			Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Terselenggaranya administrasi kantor					12 bulan	357.080.000		12 bulan	392.790.000		12 bulan	432.070.000		12 bulan	475.270.000		12 bulan	522.800.000			Sekretariat	Kab. Gresik
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibayar	10 Orang	11 Orang	220.000.000																		Sekretariat	Kab. Gresik
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa yang dibayar	12 bulan	12 bulan	204.400.000																		Sekretariat	Kab. Gresik
			Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor yang dibayar	9 Orang	10 Orang	184.500.000																		Sekretariat	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Jasa Operasional Kantor	Terbayarnya jasa operasional kantor	12 bulan			12 bulan	466.900.000	12 bulan	513.590.000	12 bulan	564.950.000	12 bulan	621.440.000	12 bulan	683.590.000	Sekretariat	Kab. Gresik
		Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase fasilitas terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.722.000.000	100%	3.647.425.000	100%	3.980.461.000	100%	8.848.940.000	100%	5.971.850.000	100%	4.204.140.000		
			Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	Jumlah ATK serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia				1 paket ; 172 unit	1.562.800.000	1 paket; 203 unit	1.810.797.000	1 paket; 203 unit	1.722.990.000	1 unit; 203 unit	2.709.140.000	1 unit; 203 unit	1.995.900.000	Sekretariat	Kab. Gresik
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rasio jumlah gedung dengan kondisi baik	90%	90%	460.000.000											Sekretariat	Kab. Gresik
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga	Jumlah gedung yang dipelihara				5 unit	409.025.000	1 unit	522.514.000	1 unit	500.000.000	1 unit	550.000.000	1 unit	600.000.000	Sekretariat	Kab. Gresik
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dan motor yang dipelihara	90%	90%	1.052.000.000	17 mobil dan 55 motor	951.100.000	18 mobil dan 55 motor	850.200.000	18 mobil dan 55 motor	749.300.000	18 mobil dan 55 motor	648.400.000	18 mobil dan 55 motor	547.500.000	Sekretariat	Kab. Gresik
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah lift yang dipelihara	2 unit	2 unit	210.000.000											Sekretariat	Kab. Gresik
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				640 unit	724.500.000	640 unit	796.950.000	640 unit	876.650.000	640 unit	964.310.000	640 unit	1.060.740.000	Sekretariat	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jabatan/Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	Roda 2: 56 Unit, Roda 4: 19 Unit									R2: 4 Unit, R4: 4 Unit	1.100.000.000			Sekretariat	Kab. Gresik
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1 Gedung							1 Gedung	5.000.000.000					Sekretariat	Kab. Gresik
		Tercukupinya kapasitas sumber daya aparatur sesuai kebutuhan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase fasilitas terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	270.000.000	100%	368.500.000	100%	396.708.000	100%	425.620.000	100%	468.180.000	100%	515.000.000		
			Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Jumlah peserta	-	100 orang	270.000.000	100 orang	368.500.000	120 orang	396.708.000	120 orang	425.620.000	120 orang	468.180.000	120 orang	515.000.000	Sekretariat	Kab. Gresik
	Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD yang akuntabel dan tepat waktu	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	-	-	547.891.000	B	127.173.000	BB	112.115.000	A	283.510.000	A	304.000.000	AA	396.500.000		
			Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang dicetak (Laporan Keuangan TA. 2016 dan LAKIP TA. 2016)	45 Buku	45 Buku	50.000.000	40 Buku	53.673.000	40 Buku	36.595.000	45 Buku	64.940.000	45 Buku	71.440.000	45 Buku	78.580.000	Sekretariat	Kab. Gresik
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya dokumen laporan tepat waktu	31 Juli 2015	31 Juli 2015	435.127.000											Bidang akuntansi dan Pertanggungjawaban	Kab. Gresik
			Penyusunan Renstra SKPD	Renstra SKPD	15 Buku	15 Buku	46.924.000									20 Buku	70.390.000	Sekretariat	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Buku yang dicetak (Renja TA. 2018 ; DPPA TA. 2017 ; dan DPA TA. 2017)	10 Buku	15 Buku	15.840.000	90 Buku	73.500.000	90 Buku	25.500.000	90 Buku	61.070.000	90 Buku	67.180.000	90 Buku	73.890.000	Sekretariat	Kab. Gresik	
			Koordinasi Penyusunan Sisdur Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan dan Sisdur yang disusun						2 Perbup/ 8 SOP	50.020.000	2 Perbup/ 8 SOP	157.500.000	2 Perbup/ 8 SOP	165.380.000	2 Perbup/ 8 SOP	173.640.000	Sekretariat	Kab. Gresik	
Mewujudkan penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual	Tersedianya informasi perencanaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Tersusunnya Perda APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu, Keterangan: tersedia sampai dengan tanggal yang ditentukan: 100%, keterlambatan sampai dengan 2 bulan dari tanggal yang seharusnya mengurangi prosentase capaian 1% perhari; keterlambatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya opini pemeriksaan BPK Keterangan: Disclaimer: 20%, Tidak Wajar: 40%, WDP: 80%, WTP: 100%.	80%	100%	19.031.117.000													
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Penetapan Perda tepat waktu	31-12-16 30-09-16	31-12-16 30-09-16	1.575.000.000											Bidang Anggaran	Kab. Gresik	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penetapan Perda tepat waktu	30-06-2016	30-06-2016	496.460.000											Bidang akuntansi dan Pertanggungjawaban	Kab. Gresik	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		>2 bulan: 30%	Bimtek Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya penatausahaan keuangan SKPD dengan baik	100%	100%	635.000.000											Bidang Perbendaharaan	Kab. Gresik
			Pendataan Pajak	Jumlah WP yang dikdata	30,000 WP	30,000 WP	2.078.576.000											Bidang Pendataan	Kab. Gresik
			Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Penatausahaan keuangan	4 kali	4 kali	375.000.000											Bidang Perbendaharaan	Kab. Gresik
			Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan	Dicetaknya SPPT PBB	739,668 lembar	75,300 lembar	105.388.000											Bidang Penetapan	Kab. Gresik
			Penyelenggaraan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terselenggaranya sistem Informasi keuangan	5 aplikasi	5 aplikasi	863.246.000											Sekretariat	Kab. Gresik
			Penatausahaan Aset	Tersedianya data aset	100%	100%	1.500.000.000											Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik
			Pemeliharaan Basis Data PBB	Jumlah OP yang diverifikasi	37,394 OP	45,000 OP	790.000.000											Bidang Pendataan dan Pengembangan	Kab. Gresik
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penerimaan tagihan (Rp)	9 M	9 M	2.025.000.000											Bidang Penagihan dan Bagi Hasil	Kab. Gresik
			Sosialisasi Kebijakan Penganggaran	Jumlah Peserta	201 Orang	210 Orang	150.000.000											Bidang Anggaran	Kab. Gresik
			Penyusunan peraturan dan sisdur pajak daerah	Ditetapkannya Perbup dan atau SOP	3 Perbup /SOP	1 Perbup /SOP	150.000.000											Sekretariat	Kab. Gresik
			Rekonsiliasi Penyusunan Belanja Pegawai	Terlaksananya sinkronisasi belanja pegawai	49 SKPD	49 SKPD	53.500.000											Bidang Anggaran	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyusunan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD	Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas bagi SKPD	-	250 Buku	93.500.000											Bidang Anggaran	Kab. Gresik
			Permutakhiran Zona Nilai Tanah	Laporan Hasil Penilaian ZNT	136 desa	220 desa	2.675.000.000											Bidang Penetapan	Kab. Gresik
			Penilaian Individu	Jumlah Laporan atas OP yang dinilai secara individu	50 OP	50 OP	150.000.000											Bidang Penetapan	Kab. Gresik
			Fasilitasi Keberatan Pajak Daerah	Terbitnya SK Penyelesaian keberatan atas pengajuan keberatan	100%	100%	20.000.000											Bidang Penagihan dan Bagi Hasil	Kab. Gresik
			Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	54 kali	54 kali	685.000.000											Bidang Penagihan dan Bagi Hasil	Kab. Gresik
			Penghapusan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah	Rasio aset dihapus	60%	60%	430.000.000											Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik
			Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah aset yang diidentifikasi	173 unit	180 unit	605.400.000											Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik
			Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan pajak	84 kali	76 kali	75.000.000											Bidang Penetapan	Kab. Gresik
			Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi dan titik pemasangan reklame	200 Orang dan 81 titik	200 Orang dan 300 titik	350.000.000											Bidang Penagihan dan Bagi Hasil	Kab. Gresik
			Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi	14 kali	14 kali	175.000.000											Bidang Penagihan dan Bagi Hasil	Kab. Gresik
			Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Bagi Hasil	Jumlah pelaksanaan koordinasi	20 kali	20 kali	265.670.000											Bidang Penagihan dan Bagi Hasil	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengelolaan Benda Berharga	Tertaksananya perforasi	12 bin	12 bin	127.000.000											Bidang Penetapan	Kab. Gresik
			Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Terselenggaranya Pengundian Bulan Panutan	2 kali	3 kali	571.000.000											Bidang Penagihan dan Bagi Hasil	Kab. Gresik
			Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta	200 peserta	200 peserta	395.000.000											Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik
			Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT DPPKAD di Cerme	Tertaksananya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Cerme	12 bin	12 bin	30.000.000											UPTD di Cerme	Kab. Gresik
			Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT DPPKAD di Sidayu	Tertaksananya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Sidayu	12 bin	12 bin	42.000.000											UPTD di Sidayu	Kab. Gresik
			Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT DPPKAD di Driyorejo	Tertaksananya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Driyorejo	12 bin	12 bin	36.000.000											UPTD di Driyorejo	Kab. Gresik
			Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT DPPKAD di Bawean	Tertaksananya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Bawean	12 bin	12 bin	22.550.000											UPTD di Bawean	Kab. Gresik
			Pemutakhiran Piutang PBB	Laporan Hasil Pemutakhiran Piutang PBB	356 desa/kel.	356 desa/kel.	135.000.000											Bidang Penagihan dan Bagi Hasil	Kab. Gresik
			Facilitasi Tukar Guling Aset	Jumlah aset yang didapatkan dari hasil tukar guling	1 paket	1 paket	625.000.000											Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik
			Koordinasi Penyusunan Belanja PPKD	Bahan Ranperda dan Ranperbup	2 Materi	2 Materi	76.000.000											Bidang Anggaran	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perbaikan Peta Pajak Bumi dan Bangunan	Terbanainya peta PBB	-	100 desa	549.627.000											Bidang Pendataan dan Pengembangan	Kab. Gresik
			Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang disesuaikan	-	100%	100.000.000											Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik
Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran	Persentase OPD yang menyusun DPA sesuai ketentuan				100%	3.542.144.000	100%	4.133.950.000	100%	4.985.990.000	100%	5.464.590.000	100%	5.986.070.000		
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperbup yang disusun				2 Ranperda dan 2 Ranperbup	2.250.000.000	2 Ranperda dan 2 Ranperbup	2.712.590.000	2 Ranperda dan 2 Ranperbup	2.722.500.000	2 Ranperda dan 2 Ranperbup	2.994.750.000	2 Ranperda dan 2 Ranperbup	3.294.230.000	Bidang Anggaran	Kab. Gresik
			Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	Jumlah Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD				2 buah	200.000.000	2 buah	220.000.000	2 buah	242.000.000	2 buah	266.200.000	2 buah	292.820.000	Bidang Anggaran	Kab. Gresik
			Koordinasi Penyusunan Belanja PPKD	Buku RKA, DPA, RDPPA dan DPPA PPKD serta data kebutuhan anggaran belanja pegawai				20 buku	150.000.000	20 buku	165.000.000	20 buku	181.500.000	20 buku	199.650.000	20 buku	219.620.000	Bidang Anggaran	Kab. Gresik
			Sosialisasi Kebijakan Penganggaran	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penganggaran				210 org	250.000.000	210 org	275.000.000	210 org	302.500.000	210 org	332.750.000	210 org	366.030.000	Bidang Anggaran	Kab. Gresik
			Penyelenggaraan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi yang dipelihara				5 aplikasi	692.144.000	2 aplikasi	761.360.000	2 aplikasi	837.490.000	2 aplikasi	921.240.000	2 aplikasi	1.013.370.000	Bidang Anggaran	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Kunjungan Kerja; Jumlah Bimtek								3 kali; 1 Kali	700.000.000	3 kali; 1 Kali	750.000.000	3 kali; 1 Kali	800.000.000	Bidang Anggaran	Kab. Gresik
			Program Pembinaan dan fasilitas penatausahaan keuangan daerah	Persentase OPD yang dibina dan difasilitasi dalam penatausahaan keuangan daerah	100%	100%		100%	2.159.211.000	100%	2.324.508.000	100%	2.390.350.000	100%	2.521.954.000	100%	2.682.990.000		
			Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta Bimtek				760 orang	670.000.000	50 OPD	733.728.000	50 OPD	690.230.000	50 OPD	704.040.000	50 OPD	718.120.000	Bidang Perbendaharaan	Kab. Gresik
			Penatausahaan Keuangan Daerah	Tersusunnya SK, SPD, SP2D, Laporan Posisi Kas, Laporan Pertanggungjawaban Lainnya dari seluruh OPD				100%	450.000.000	50 OPD	472.500.000	50 OPD	496.130.000	50 OPD	520.930.000	50 OPD	546.980.000	Bidang Perbendaharaan	Kab. Gresik
			Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Tersedianya Laporan Semester I dan Prognosis Tahun 2017 dan LRA PerBulan				231 Buku; 12 Laporan	497.300.000	231 Buku	522.180.000	231 Buku	548.280.000	231 Buku	575.700.000	231 Buku	604.480.000	Bidang Perbendaharaan	Kab. Gresik
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Ranperda dan Ranperbup				1 Ranperda dan 1 Ranperbup	541.911.000	1 Perda dan 1 Perbup	596.100.000	1 Perda dan 1 Perbup	655.710.000	1 Perda dan 1 Perbup	721.284.000	1 Perda dan 1 Perbup	793.410.000	Bidang Perbendaharaan	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Persentase akurasi data aset daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset			-	100%	2.842.253.000											
			Penatausahaan Aset	Jumlah Aset				1.640	1.400.000.000										Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik
			Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah Aset yang diidentifikasi				100%	651.366.000										Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik
			Penghapusan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penjualan aset				100%	295.887.000										Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik
			Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta				189 orang	395.000.000										Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik
			Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang sudah disesuaikan				100%	100.000.000										Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik
			Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset						100%	2.854.326.000	100%	2.860.580.000	100%	4.033.570.000	100%	3.218.180.000			
			Penatausahaan Aset	Jumlah Aset						1400	1.495.396.000	1480	1.543.500.000	1550	1.620.680.000	1600	1.701.710.000		Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Rasio aset yang dimanfaatkan						80%	653.930.000	80%	718.130.000	80%	754.040.000	80%	791.740.000	Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik		
			Penghapusan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah	Pemindahtangana set						10%	395.000.000									Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik
				Penghapusan aset						10%											
			Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta						189 orang	200.000.000	189 orang	477.950.000	189 orang	525.750.000	189 orang	578.320.000	Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik		
			Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah	Fasum dan fasos yang diinventarisasi							3 developer/pengembang	110.000.000	3 developer/pengembang	121.000.000	3 developer/pengembang	133.100.000	3 developer/pengembang	146.410.000	Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik	
			Fasilitasi Tukar Guling Aset	Peralatan dan perlengkapan kantor yang ditukargulingkan								1 paket	1.000.000.000					Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik		
			Penghapusan dan Pemindahtanganan barang Milik Daerah	Penghapusan aset; Pemindahtanganan								10%; 10%	274.000.000	10%; 10%	300.000.000	10%; 10%	325.000.000	Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik		
			Fasilitasi Penilaian Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah yang dinilai								60 Unit	154.000.000	65 Unit	170.000.000	70 Unit	195.000.000	Bidang Pengelolaan Aset	Kab. Gresik		
Meningkatkan kinerja keuangan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase capaian realisasi pendapatan daerah	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase capaian target pendapatan pajak daerah lain (selain PBB dan BPHTB)	-	-	-	100%	2.717.005.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-				
			Pendataan Pajak	Jumlah SPTPD yang didata				11,726	1.968.670.000											Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan pajak			92 Kali	100.268.000										Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kab. Gresik
			Pengelolaan Benda Berharga	Tercetaknya karcls			1 paket	125.688.000										Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kab. Gresik
			Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Jumlah Cetakan Publikasi			200 Orang dan 300 titik	260.000.000										Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kab. Gresik
			Penyusunan peraturan dan sisdur pajak daerah	Jumlah Perbup dan atau SOP			10 Perbup/SOP	107.876.000										Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kab. Gresik
			Analisis Potensi Pajak Daerah	Laporan Analisis Potensi Pajak Daerah			5 jenis pajak	154.503.000										Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kab. Gresik
			Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase capaian target pendapatan pajak daerah lain (selain PBB dan BPHTB)			100%		100%	2.571.161.000	100%	3.010.440.000	100%	3.563.860.000	100%	3.642.620.000			
			Pendataan Pajak	Jumlah SPTPD yang didata					11.726	1.749.130.000	12.000	2.382.090.000	12.000	2.620.300.000	12.000	2.982.330.000		Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kab. Gresik
			Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan pajak					120 Kali	163.891.000	92 Kali	100.270.000	92 Kali	100.270.000	92 Kali	100.270.000		Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kab. Gresik
			Pengelolaan Benda Berharga	Tercetaknya karcls					1 Tahun	130.484.000	1 paket	152.080.000	1 paket	167.290.000	1 paket	184.020.000		Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kab. Gresik
			Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Jumlah Cetakan Publikasi					240 Orang dan 439 Cetakan	333.130.000	200 Orang dan 300 titik	376.000.000	200 Orang dan 300 titik	376.000.000	200 Orang dan 300 titik	376.000.000		Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kab. Gresik
			Analisis Potensi Pajak Daerah	Laporan Analisis Potensi Pajak Daerah					3 jenis pajak	194.526.000			10 jenis pajak	300.000.000				Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kab. Gresik



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB	Persentase capaian target pendapatan PBB dan BPHTB			-	100%	2.392.743.000											
			Penilaian Individu	Jumlah OP yang dilakukan penilaian individu				50 OP	118.000.000										Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik
			Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi				54 kali	700.000.000										Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik
			Pemeliharaan Basis Data PBB	Jumlah objek pajak yang diverifikasi				40.000 OP	917.850.000										Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik
			Perbaikan Peta Pajak Bumi dan Bangunan	Peta PBB yang diperbaiki				1 Paket	500.000.000										Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik
			Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah SPPT PBB yang dicetak				753000 lembar	156.893.000										Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik
			Pemutakhiran Zona Nilai Tanah	Laporan Hasil Penilaian ZNT															Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik
			Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB	Persentase capaian target pendapatan PBB dan BPHTB				100%	-	100%	2.599.676.000	100%	1.813.040.000	100%	4.100.770.000	100%	4.256.000.000			
			Penilaian Individu	Jumlah OP yang dilakukan penilaian individu						50 OP	124.400.000	50 OP	130.620.000	50 OP	137.150.000	50 OP	144.000.000	Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik	
			Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi						54 kali	821.620.000								Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik
			Pemeliharaan Basis Data PBB	Jumlah objek pajak yang diverifikasi						45.000 OP	1.376.750.000								Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah SPPT PBB yang dicetak						760.000 lembar	276.906.000	770000 lembar	172.970.000	780000 lembar	181.620.000	790000 lembar	190.700.000	Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik	
			Pemutakhiran Zona Nilai Tanah	Laporan Hasil Penilaian ZNT										178 desa/kel.	2.136.000.000	178 desa/kel.	2.136.000.000	Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik	
			Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB	Jumlah Data yang diolah								70.000 data	582.800.000	80.000 data	695.500.000,00	85.000 data	735.300.000	Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik	
			Pendataan dan Verifikasi PBB	Jumlah OP yang diverifikasi								40.000 OP	926.650.000	40.000 OP	950.500.000	40.000 OP	1.050.000.000	Bidang PBB BPHTB	Kab. Gresik	
			Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah	1. Persentase capaian target penagihan pajak daerah terhadap tunggakan potensial 2. Persentase capaian target pendapatan selain pajak daerah 3. Capain SKM Pelayanan	42%		45%	3.925.751.000	49%	4.013.313.000	52%	4.344.420.000	55%	4.433.330.000	58%	4.541.120.000				
					90%		100%		100%		100%		100%		100%					
					Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik			
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penunggak pajak daerah yang ditagih			100%	2.006.900.000	100%	2.006.810.000	100%	2.006.810.000	100%	2.006.810.000	100%	2.006.810.000	100%	2.006.810.000	Bidang Penagihan dan Pelayanan	Kab. Gresik
			Fasilitasi Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan keberatan yang ditindaklanjuti			100%	69.500.000	100%	89.193.000	100%	69.500.000	100%	69.500.000	100%	69.500.000	100%	69.500.000	Bidang Penagihan dan Pelayanan	Kab. Gresik
			Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan			26 kali	299.300.000	26 kali	129.230.000	26 kali	362.150.000	26 kali	398.370.000	26 kali	438.210.000	26 kali	438.210.000	Bidang Penagihan dan Pelayanan	Kab. Gresik
			Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Bagi Hasil	Jumlah koordinasi dan evaluasi			13 kali	316.610.000	15 kali	383.618.000	15 kali	383.100.000	15 kali	421.410.000	15 kali	463.550.000	15 kali	463.550.000	Bidang Penagihan dan Pelayanan	Kab. Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF (Jutaan Rupiah)										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
						2016		2017		2018		2019		2020				2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD di Cerme	Tertaksananya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Cerme				12 bln	42.000.000	12 bln	46.200.000	12 bln	50.820.000	12 bln	55.900.000	12 bln	61.490.000	Bidang Penagihan dan Pelayanan	Kab. Gresik		
			Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD di Sidayu	Tertaksananya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Sidayu				12 bln	56.000.000	12 bln	61.600.000	12 bln	67.760.000	12 bln	74.540.000	12 bln	81.990.000	Bidang Penagihan dan Pelayanan	Kab. Gresik		
			Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD di Driyorejo	Tertaksananya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Driyorejo				12 bln	50.475.000	12 bln	55.520.000	12 bln	61.070.000	12 bln	67.180.000	12 bln	73.900.000	Bidang Penagihan dan Pelayanan	Kab. Gresik		
			Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD di Bawean	Tertaksananya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Bawean				12 bln	28.550.000	12 bln	35.810.000	12 bln	34.550.000	12 bln	38.000.000	12 bln	41.800.000	Bidang Penagihan dan Pelayanan	Kab. Gresik		
			Pemutakhiran Piutang PBB	Laporan Hasil Pemutakhiran Piutang PBB				40 Buku	379.070.000	40 Buku	479.070.000	40 Buku	379.070.000	40 Buku	279.070.000	40 Buku	179.070.000	Bidang Penagihan dan Pelayanan	Kab. Gresik		
			Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Peserta Bulan Panutan				800 Orang	677.346.000	800 Orang	626.262.000	800 Orang	819.590.000	800 Orang	901.550.000	800 Orang	991.700.000	Bidang Penagihan dan Pelayanan	Kab. Gresik		
			Peningkatan Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah	Terselenggaranya pelayanan pajak daerah						12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	121.000.000	12 bulan	133.100.000	Bidang Penagihan dan Pelayanan	Kab. Gresik		
Jumlah									25.806.700.000		23.741.235.000		25.159.803.000		31.402.480.000		33.543.874.000		32.370.730.000		